

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik, maka pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sangat penting. Penelitian terhadap objek yang diteliti merupakan salah satu unsur dalam pemahaman, untuk itu peneliti menjelaskan variabel yang terdapat dalam penelitian.

2.1.1 Ketimpangan Pendapatan

2.1.1.1 Pengertian Ketimpangan Pendapatan

Distribusi pendapatan adalah konsep yang lebih luas dibandingkan analisis kemiskinan karena cakupannya tidak hanya menganalisa populasi yang berada dibawah garis kemiskinan, melainkan ketidakmerataan pendapatan antar kelompok masyarakat dalam suatu daerah, ketidakmerataan inilah yang kerap didefinisikan sebagai kesenjangan (*inequality*) dalam distribusi pendapatan (Wibowo, 2012).

Menurut Smith dan Todaro (2012), ketimpangan pendapatan adalah terdapatnya perbedaan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional diantara masyarakat. Sedangkan menurut Baldwin (dalam Richardson, 1991), ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan kemakmuran dalam perekonomian antara yang kaya dengan yang miskin. Ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah adalah adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Perbedaan ini yang

menyebabkan tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Kuncoro, 2006).

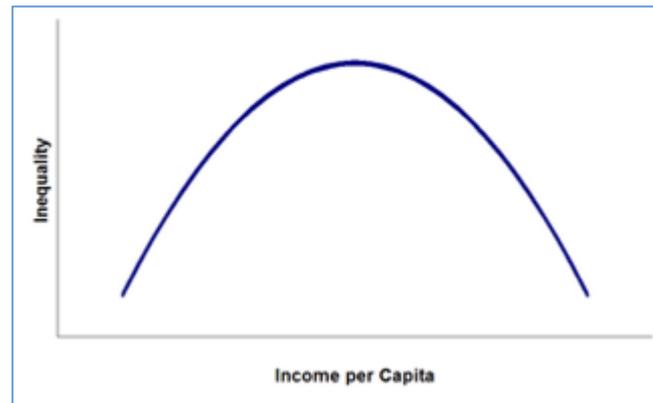
Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan adalah ketidakmerataan distribusi pendapatan dikarenakan adanya perbedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat sehingga mengakibatkan adanya jurang pemisah antara golongan masyarakat atas yang semakin kaya dan golongan masyarakat bawah yang semakin miskin. Sedangkan ketimpangan pendapatan regional adalah ketidakmerataan pendapatan yang terjadi pada masyarakat suatu wilayah dengan wilayah lain.

2.1.1.2 Konsep dan Ukuran Ketimpangan Pendapatan

Menurut Sukirno (2006), terdapat dua konsep pokok mengenai pengukuran distribusi pendapatan, yaitu konsep ketimpangan absolut dan konsep ketimpangan relatif. Konsep ketimpangan absolut merupakan konsep pengukuran ketimpangan yang menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak. Sedangkan konsep ketimpangan relatif merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan.

Lebih lanjut Simon Kuznets (dalam BPS) mengemukakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan perekonomian, distribusi pendapatan akan cenderung memburuk. Lalu pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan akan membaik.

Hubungan antara pembangunan dengan tingkat distribusi pendapatan seperti kurva U-terbalik (*inverted-U curve*).



Sumber: learneconomiconline.com

Gambar 2.1 Kurva Kuznets

Pada awal proses pembangunan baru dimulai di negara sedang berkembang, kesempatan dan peluang pembangunan yang ada dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunannya sudah lebih baik. Sedangkan pada daerah yang masih sangat terbelakang tidak mampu melaksanakan peluang ini karena keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hambatan ini tidak saja disebabkan oleh faktor ekonomi tetapi juga faktor sosial dan budaya sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat karena pertumbuhan ekonomi cenderung lebih cepat di daerah yang kondisinya lebih baik. Sedangkan pada daerah yang terbelakang tidak banyak mengalami kemajuan.

Tambunan (2001), mengatakan ada sejumlah indikator yang digunakan untuk menganalisis “*development gap*” atau “kesenjangan” antar kabupaten/kota, provinsi, atau negara, yaitu:

- a. Distribusi PDRB menurut provinsi atau kabupaten/kota

b. Konsumsi rumah tangga perkapita

c. *Human Development Index*

Asumsinya, semakin baik pembangunan di suatu wilayah maka semakin tinggi HDInya.

d. Kontribusi sektoral terhadap PDRB

Kontribusi sektoral terhadap PDRB dapat dihitung melalui angka distribusi persentase PDRB baik berdasarkan harga yang berlaku maupun berdasarkan harga konstan

e. Struktur fiskal

Daerah yang tingkat pembangunannya tinggi, maka pendapatan riil perkapita dan penerimaan pemerintah daerah (PAD) tersebut juga tinggi.

Dalam menganalisa ketimpangan di suatu wilayah diperlukan alat atau ukuran-ukuran yang dapat menimbang tingkat ketimpangan di wilayah tersebut, yaitu Indeks Williamson, Koefisien Gini, Theil Indeks dan lain-lain. Bahkan, Bank Dunia menciptakan kriteria umum untuk membandingkan tingkat ketimpangan, sebagai berikut:

1. Koefisien Gini

Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan. Ukuran ini pertama kali dikembangkan oleh ahli statistik dan ahli sosiologi Italia bernama Corrado Gini dan dipublikasikan pada tahun 1912 dalam makalahnya yang berjudul "*Variability and Mutability*" (Machmud, 2016). Koefisien Gini dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna, sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang

paling tinggi yaitu satu orang menguasainya dan yang lainnya tidak sama sekali. Walaupun demikian, seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia bernama Michael Todaro menyebutkan bahwa:

- a. Gini rasio antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang
- b. Gini rasio antara 0,36 – 0,49 menunjukkan kesenjangan sedang
- c. Gini rasio antara 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan yang tinggi

Sedangkan formula Indeks Gini yaitu:

$$G = 1 - \sum_1^n (X_i + 1 - X_i)(Y_i + Y_i + 1)$$

$$0 < G < 1$$

$$G = 1 - \sum_1^n f_i (Y_i + Y_i + 1)$$

Dimana:

G = rasio Gini

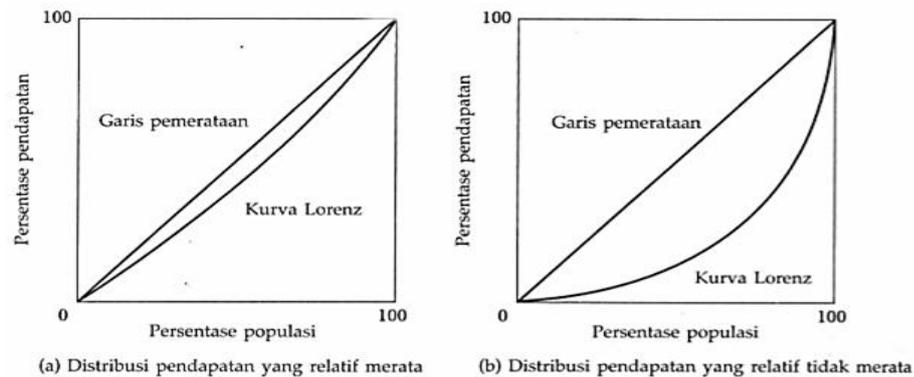
F_i = proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i

X_{i+1} = proporsi jumlah kumulatif rumah tangga dalam kelas i

Y_{i+1} = proporsi kumulatif pendapatan dalam kelas i

Dalam hal ini, kenyataannya tidak mungkin suatu daerah/wilayah mempunyai angka gini rasio yang besarnya sama dengan nol dan satu. Secara visual, Indeks Gini dapat dijelaskan menggunakan kurva Lorenz. Kurva Lorenz memiliki sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu horizontal menyatakan jumlah penerimaan pendapatan dalam persentase kumulatif (penduduk). Sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah (kelompok) penduduk tersebut. Semakin besar tingkat

ketimpangan, kurva Lorenz akan semakin melengkung dan semakin mendekati bagian bawah sumbu horizontal.



Sumber: Todaro dan Smith (2011)

Gambar 2.2 Kurva Lorenz

2. Indeks Williamson

Ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah yang mula-mula dilakukan adalah *Williamson Index* yang digunakan dalam studi Jeffrey G. Williamson pada tahun 1996. Secara ilmu statistik, indeks ini sebenarnya adalah *coefficient of variation* yang lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan (Sjafrizal, 2017:110). Indeks Williamson adalah suatu indeks yang didasarkan pada ukuran penyimpangan pendapatan perkapita penduduk tiap wilayah dan pendapatan perkapita nasional. Suatu daerah dapat dikatakan memiliki ketimpangan yang rendah jika nilai Indeks Williamson kurang dari 0,35. Ketimpangan dengan taraf sedang ditunjukkan dengan nilai Indeks Williamson antara 0,35 hingga 0,5. Sedangkan daerah dengan Indeks Williamson yang lebih besar dari 0,5 menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang tinggi.

Berikut formula Indeks Williamson (Sjafrizal, 2017):

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{y} \quad 0 < V_w < 1$$

Dimana:

y_i = PDRB per kapita daerah i

y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah

f_i = Jumlah penduduk daerah i

n = Jumlah penduduk seluruh daerah

3. Indeks Theil

Menurut Kuncoro (2004), konsep entropi Theil dari distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri. Studi empiris yang dilakukan oleh Theil dengan menggunakan indeks entropi menawarkan pandangan yang tajam mengenai pendapatan regional perkapita dan kesenjangan pendapatan, kesenjangan internasional dan distribusi produk domestik bruto dunia. Untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto Provinsi, Ying menggunakan indeks ketimpangan regional. Indeks ketimpangan regional Theil tersebut dapat dibagi menjadi dua subindikasi yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antar wilayah (Ying, 2000). Formula dari indeks Theil (Sjafrizal, 2017), yaitu:

$$T_d = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \{y_{ij}/Y\} \log[\{y_{ij}/Y\}/\{n_{ij}/N\}]$$

Dimana:

Y_{ij} = PDRB per kapita kabupaten i di provinsi j

Y = Jumlah PDRB Per kapita seluruh provinsi j

n = Jumlah penduduk kabupaten i di provinsi j

N = Jumlah penduduk seluruh kabupaten

4. Kriteria Bank Dunia

Menurut Bank Dunia, untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan dapat dilakukan dengan memfokuskan pada seberapa besar persentase yang diterima oleh 40 persen kelompok penduduk dengan pendapatan terendah terhadap seluruh pendapatan penduduk disuatu daerah. Indikator tersebut membagi penduduk menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

- a. Kelompok 20 persen penduduk berpendapatan tinggi
- b. Kelompok 40 persen penduduk berpendapatan menengah
- c. Kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah

Kemudian Bank Dunia memusatkan pada kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Ketimpangan tinggi, jika persentase pendapatan yang diterima kelompok kurang dari 12%.
- b. Ketimpangan sedang, jika persentase pendapatan yang diterima kelompok antara 7% hingga 12%.
- c. Ketimpangan rendah, jika persentase pendapatan yang diterima kelompok lebih dari 17%.

2.1.1.3 Faktor-faktor Penyebab Ketimpangan Pendapatan

Adelman dan Morris (Arsyal 1992:174) dalam Rosti Maidar, dkk (2017), mengatakan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan disebabkan oleh sebagai berikut:

- 1) Pertambahan penduduk yang tinggi menyebabkan menurunnya pendapatan perkapita.
- 2) Inflasi, pertambahan pendapatan uang tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.
- 3) Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
- 4) Investasi yang besar dalam proyek padat modal dibandingkan dengan investasi padat karya sehingga pengangguran bertambah.
- 5) Rendahnya mobilitas sosial.
- 6) Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
- 7) Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara-negara berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara berkembang.
- 8) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Menurut Sjafrizal (2017:119), faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah adalah sebagai berikut:

1) Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam

Penyebab pertama yang mendorong timbulnya ketimpangan ekonomi antar wilayah adalah adanya perbedaan kandungan sumber daya alam pada masing-masing daerah. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun kandungan sumber daya alam tiap daerahnya berbeda-beda. Ada daerah yang memiliki minyak dan gas alam, tetapi daerah lain tidak mempunyai. Ada daerah yang mempunyai deposit batubara yang cukup besar, tetapi daerah lain tidak ada. Demikian pula halnya dengan tingkat kesuburan lahan yang juga sangat bervariasi, sehingga mempengaruhi upaya untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing-masing daerah. Perbedaan kandungan sumber daya alam tersebut tentu saja akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam yang cukup banyak akan dapat memproduksi barang dan jasa tertentu dengan biaya yang relatif murah, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat.

Berbeda dengan daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam yang lebih sedikit hanya akan memproduksi barang dan jasa dengan biaya produksi lebih mahal sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut selanjutnya menyebabkan daerah bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Dengan demikian, terlihat bahwa

perbedaan kandungan sumber daya alam dapat mendorong terjadinya ketimpangan ekonomi antar wilayah yang lebih tinggi.

2) Perbedaan Kondisi Geografis

Kondisi geografis yang dimaksud meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi ini kemudian akan memengaruhi ketimpangan ekonomi antar wilayah, karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan memiliki tingkat produktivitas kerja yang lebih tinggi, sedangkan daerah dengan kondisi geografis yang kurang baik akan menyebabkan relatif rendahnya tingkat produktivitas kerja. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong para investor untuk lebih memilih menanamkan modalnya di daerah yang kondisi demografisnya lebih baik sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bersangkutan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi di daerah yang kondisi geografisnya kurang baik akan lebih rendah karena para investor kurang tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut.

3) Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa antar wilayah dapat mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi, baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah

karena jika mobilitas tersebut kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian dengan migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak akan dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya. Akibatnya, dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi antarwilayah, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong kegiatan ekonominya.

4) Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan memengaruhi ketimpangan ekonomi antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut kemudian akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Sebaliknya, jika konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah akan mendorong terjadinya pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat.

5) Alokasi Dana Pembangunan Antarwilayah

Tidak dapat dipungkiri bahwa investasi merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu, daerah yang mendapatkan alokasi investasi lebih besar baik dari pemerintah maupun swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kondisi ini tentunya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi.

Alokasi investasi pemerintah ke suatu daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Apabila sistem pemerintahan yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung tinggi. Namun, apabila sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau desentralisasi, maka dana investasi akan lebih dialokasikan ke pemerintah daerah, sehingga ketimpangan antarwilayah akan cenderung rendah. Tidak halnya dengan investasi swasta yang lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah. Keuntungan lokasi tersebut ditentukan pula oleh ongkos transport baik untuk bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Karena itulah, tidak mengherankan jika investasi cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan dibandingkan dengan pedesaan.

2.1.1.4 Dampak Ketimpangan Pendapatan

Menurut Todaro (2004), terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan dapat memberikan dampak yaitu berupa dampak positif dan dampak negatif. Positifnya, dapat mendorong daerah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan akan tercapai. Negatifnya, dapat menimbulkan beberapa masalah diantaranya inefisiensi ekonomi, melemahnya stabilitas sosial dan solidaritas serta ketimpangan yang tinggi akan dirasa tidak adil.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat juga menyebabkan bertambah lebarnya ketimpangan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang miskin) dan ketimpangan antarwilayah (yang maju dan tertinggal). Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan maupun antarwilayah dapat menimbulkan permasalahan seperti kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang semakin tajam dan melebar.

2.1.2 PDRB

2.1.2.1 Pengertian PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Pada umumnya, PDRB digunakan sebagai indikator baik buruknya perekonomian suatu negara dan sebagai tolok ukur kesejahteraan masyarakat. PDRB adalah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Menurut BPS, PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen (warga negara) atau non residen.

Kuncoro (2001) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB. Oleh karena itu, besaran PDRB

yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut.

PDRB per kapita merupakan turunan dari PDRB. Terdapat dua ukuran PDRB per kapita yaitu PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Sedangkan, PDRB per kapita atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu wilayah (BPS). Menurut Thamrin (2001:79), semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakatnya. Adapun formula PDRB per kapita sebagai berikut:

$$\text{PDRB per kapita} = \frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

2.1.2.2 Perhitungan PDRB

Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode diantaranya sebagai berikut:

a. Metode Langsung

Secara konseptual, ada tiga macam pendekatan untuk menghitung Produk Domestik Regional Bruto, yaitu sebagai berikut:

1) Pendekatan Produksi

Dalam pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi yang mendasari PDRB berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha dikelompokkan menjadi:

- a. Pertanian, kehutanan dan perikanan
- b. Pertambangan dan penggalian
- c. Industri pengolahan
- d. Pengadaan listrik dan gas
- e. Pengadaan air bersih
- f. Konstruksi
- g. Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor
- h. Transportasi dan pergudangan
- i. Penyediaan akomodasi dan makan minum
- j. *Real estate*
- k. Informasi dan komunikasi
- l. Jasa keuangan
- m. Jasa perusahaan
- n. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
- o. Jasa pendidikan
- p. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
- q. Jasa lainnya

Rumus PDRB dengan pendekatan produksi adalah:

$$Y = (P_1 \times Q_1) + (P_2 \times Q_2) + \dots + (P_n \times Q_n)$$

Dimana:

Y = Pendapatan nasional

P_n = Harga barang ke n

Q_n = Jenis barang ke n

2) Pendekatan pengeluaran

PDRB dalam pendekatan ini didefinisikan sebagai semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
- b. Konsumsi pemerintah
- c. Pembentukan modal tetap domestik bruto
- d. Perubahan inventori dan
- e. Ekspor neto (ekspor dikurangi impor)

Rumus PDRB dengan pendekatan pengeluaran adalah:

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

Dimana:

Y = Pendapatan nasional

C = *Consumption*

I = *Investment*

G = *Government expenditure*

X = *Export*

M = *Import*

3) Pendekatan pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi suatu daerah pada periode tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, dimana besarnya adalah sebelum dipotong pajak

penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam hal ini, PDRB mencakup pula penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

Rumus PDRB dengan pendekatan pendapatan adalah:

$$Y = r + w + i + \Pi$$

Dimana:

Y = Pendapatan nasional

r = *rent* (sewa)

w = *wage* (upah)

i = *interest* (bunga)

Π = *profit* (laba)

b. Metode Tidak Langsung

Dalam metode ini PDRB suatu wilayah diperoleh dengan menghitung PDRB wilayah tersebut melalui alokasi PDRB wilayah yang lebih luas. Untuk melakukan alokasi PDRB wilayah ini digunakan beberapa alokator antara lain: Nilai produksi bruto atau netto setiap sektor/subsektor pada wilayah yang dialokasikan, jumlah produk fisik, tenaga kerja, penduduk dan alokator tidak langsung lainnya. Dengan menggunakan salah satu atau beberapa alokator dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing provinsi terhadap nilai tambah setiap sektor dan subsektor.

2.1.2.3 Kegunaan Statistik PDRB

Data PDRB merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian wilayah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

a. PDRB atas dasar harga berlaku

Penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen PDRB. Ini menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar begitu juga sebaliknya. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi, dan diperdagangkan dengan pihak luar wilayah.

b. PDRB atas dasar harga konstan

Dikenal empat cara untuk menghitung PDRB atas dasar harga konstan (BPS, 2018), yaitu:

1. Revaluasi

Prinsip yang digunakan yaitu menilai barang dan jasa pada tahun berjalan dengan menggunakan harga pada tahun dasar. Dalam hal ini, yang digunakan adalah tahun 2000. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antar output dan biaya antara masing-masing atas dasar harga konstan.

2. Ekstrapolasi

Berdasarkan metode ekstrapolasi, nilai tambah atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 2010 dengan indeks produksi.

3. Deflasi

Berdasarkan metode deflasi, nilai tambah atas dasar harga konstan 2010 didapat dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku pada tahun berjalan dengan indeks harga yang sesuai.

4. Deflasi berganda

Dalam metode deflasi berganda, yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara output dengan biaya antara hasil deflasi tersebut.

PDRB atas dasar harga konstan, semua agregat dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. PDRB atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

c. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor dalam suatu wilayah. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.

2.1.3 Investasi

2.1.3.1 Pengertian investasi

Investasi adalah penanaman asset atau dana yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Investasi adalah salah satu komponen dalam

pembangunan ekonomi karena investasi memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan ekonomi di masa depan. Dengan melakukan investasi diharapkan kapasitas produksi dapat ditingkatkan sehingga dapat mendorong peningkatan output. Dengan begitu, peningkatan output akan meningkatkan pendapatan.

Menurut Sadono Soekirno, investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Menurut Boediono, investasi adalah pengeluaran oleh sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan atau untuk perluasan pabrik. Sedangkan menurut Nanga (2011), investasi adalah tambahan bersih terhadap stok capital atau bisa juga disebut akumulasi modal.

Berdasarkan buku panduan yang diterbitkan oleh *United Nations* (PBB) tentang penyusunan neraca nasional yang disebut *System of National Accounts* (SNA), besarnya investasi yang direalisasikan di suatu wilayah/negara pada waktu tertentu adalah sama dengan jumlah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ditambah dengan perubahan inventori/stok. PMTB merupakan investasi fisik domestik yang telah direalisasikan pada suatu periode tertentu. Inventori termasuk dalam modal kerja yang merupakan bagian investasi yang direncanakan. Perubahan inventori yaitu selisih antar stok akhir dengan stok awal pada suatu tahun tertentu (BPS).

2.1.3.2 Teori Investasi

Berikut teori mengenai investasi menurut para ahli:

a) Teori Klasik

Dalam Arsyad (2010:88-89) teori ini menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Semakin cepat perkembangan investasi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk, maka semakin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Semakin tinggi rasio capital per tenaga kerja maka kapasitas produksi tenaga kerja cenderung semakin tinggi.

b) Teori Harrod Domar

Dalam Sadono Soekirno (2007:256-257) memandang bahwa pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, dimana beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Menurut Harrod-Domar, pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan peningkatan efektif seluruh masyarakat. Untuk meningkatkan laju perekonomian maka diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok tambahan modal. Harrod Domar menjelaskan bahwa antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi positif, sehingga dapat dikatakan bahwa kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan

tingkat pendapatan masyarakat perkapita di wilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan ekonomi produktif.

2.1.3.3 Jenis-Jenis Investasi

Menurut Sunariyah (2004:4) investasi dalam arti luas terdiri dari dua bagian utama yaitu:

a. *Real Investment*

Yaitu investasi nyata yang secara umum melibatkan asset berwujud seperti tanah, mesin-mesin atau pabrik.

b. *Financial Investment*

Yaitu investasi keuangan yang secara umum melibatkan asset kontrak tertulis seperti saham biasa (*common stock*) dan obligasi (*bond*). Pilihan aktiva finansial dalam rangka investasi pada sebuah entitas dapat dilakukan dengan dua cara:

a) Investasi langsung (*direct investement*)

Investasi langsung dapat diartikan sebagai suatu pemilikan surat-surat berharga secara langsung dalam suatu entitas yang secara resmi telah *go public* dengan harapan akan mendapatkan keuntungan berupa penghasilan dividen dan *capital gains*.

b) Investasi tidak langsung (*indirect investment*)

Investasi tidak langsung terjadi apabila surat-surat berharga yang dimiliki diperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi yang berfungsi sebagai perantara. Pemilik aktiva tidak langsung dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan terdaftar, yang bertindak sebagai perantara atau

intermediary. Dalam peranannya sebagai investor tidak langsung, pedagang perantara mendapatkan dividen dan *capital gain* seperti dalam investasi langsung, selain itu juga akan memperoleh penerimaan berupa *capital gain* atas hasil perdagangan portofolio yang dilakukan oleh perusahaan perantara tersebut.

Perbedaan antara investasi riil dan investasi finansial adalah tingkat likuiditas dari kedua investasi tersebut. Investasi riil lebih sulit untuk dicairkan karena terbentur pada komitmen jangka panjang antara investor dengan perusahaan. Sementara investasi finansial lebih mudah dicairkan karena dapat diperjualbelikan tanpa terikat waktu.

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Investasi Pemerintah

Merupakan investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

b. Investasi Swasta

Merupakan investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut dengan Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah konsumsi pun bertambah dan bertambah pula *effective*

demand. Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut *induced investment*.

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ketentuan mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri didalam UU No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara negeri, badan usaha negeri, dan/atau pemerintah negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal dalam negeri memberikan peranan dalam pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang, hal ini terjadi dalam berbagai bentuk. Modal investasi mampu mengurangi kekurangan tabungan dan melalui pemasukan peralatan modal dan bahan mentah, dengan demikian menaikkan laju pemasukan modal. Selain itu, tabungan dan investasi yang rendah mencerminkan kurangnya modal di negara yang keterbelakangan teknologi. Bersamaan dengan modal uang dan modal fisik, modal investasi yang membawa serta keterampilan teknik, tenaga ahli, pengalaman organisasi, informasi pasar, teknik-teknik produksi maju, dan lain-lain akan melatih tenaga kerja setempat pada keahlian baru. Hal ini pada akhirnya akan mempercepat pembangunan ekonomi negara berkembang.

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Dalam literatur ekonomi, investasi asing dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung atau *foreign direct investment* (FDI). Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrument surat berharga seperti saham dan obligasi. Sedangkan investasi langsung merupakan bentuk investasi dengan berupa pembangunan, pembelian total atau mengakuisisi perusahaan. Menurut UU No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal, Penanaman Modal Asing merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal negeri (Pasal 1 Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Modal asing dapat berperan penting dalam memobilisasi dana maupun transformasi struktural. Bagi negara-negara sedang berkembang yang tidak mampu memulai membangun industri-industri berat dan industri strategis, adanya modal asing sangat membantu untuk dapat mendirikan pabrik-pabrik baja, alat-alat mesin, pabrik elektronik dan sebagainya.

2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

2.1.4.1 Pengertian Pengangguran

Pengangguran (*unemployment*) merupakan kenyataan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang (*developing countries*) maupun negara-negara maju

(*developed countries*). Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan (Nanga, 2001). Selain itu, pengangguran diartikan sebagai jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya (Sukirno, 2004:28).

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ada empat pengertian terkait dengan pengangguran yaitu:

- a. Mereka yang bekerja dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

2.1.4.2 Jenis-jenis Pengangguran

Menurut Sukirno (2006:328) ada dua golongan jenis pengangguran, yaitu:

1. Berdasarkan Penyebabnya

Jenis pengangguran berdasarkan keadaan yang menyebabkannya dibedakan menjadi:

a. Pengangguran Siklikal (*Cyclical Unemployment*)

Yaitu pengangguran yang terjadi karena maju mundurnya ekonomi suatu negara. Ketika perekonomian mengalami kemunduran daya beli

masyarakat pun akan menurun. Akibatnya perusahaan akan mengurangi produksi dan banyak memberhentikan karyawannya.

b. Pengangguran Friksional (*Frictional unemployment*)

Pengangguran friksional merupakan jenis pengangguran yang timbul sebagai akibat dari adanya perubahan didalam syarat-syarat kerja, yang terjadi seiring dengan perkembangan atau dinamika ekonomi yang terjadi. Jenis pengangguran ini dapat pula terjadi karena berpindahnya orang-orang dari satu daerah ke daerah lain, atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dan akibatnya harus mempunyai tenggang waktu dan berstatus sebagai penganggur sebelum mendapatkan pekerjaan yang lain.

c. Pengangguran Struktural (*Structural unemployment*)

Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian. Hal ini terjadi dalam perekonomian yang berkembang pesat. Pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan yang tersedia.

d. Pengangguran Teknologi (*Technology unemployment*)

Pengangguran ini disebabkan oleh adanya peralihan dari tenaga kerja manusia menjadi mesin. Perusahaan biasanya lebih memilih menggunakan tenaga mesin dibandingkan tenaga manusia karena lebih cepat, mudah dan hemat biaya. Hal inilah yang membuat posisi manusia tergantikan oleh teknologi.

2. Berdasarkan Cirinya

Dalam hal ini, pengangguran dikelompokkan menjadi empat jenis sebagai berikut:

a. Pengangguran Terbuka (*Open unemployment*)

Pengangguran terbuka yaitu usia angkatan kerja yang tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan dalam waktu dekat. Jenis pengangguran ini seringkali diidentikan dengan seseorang yang bingung dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

b. Setengah Menganggur

Setengah penganggur adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja (kurang dari 35 jam dalam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).

c. Pengangguran Terselubung

Jenis pengangguran terselubung seringkali diartikan sebagai tenaga kerja tersembunyi, yaitu angkatan kerja yang sudah bekerja tetapi tidak bekerja secara optimal. Pengangguran ini bisa terjadi karena seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya sehingga bekerja tidak optimal.

d. Pengangguran Musiman

Pengangguran ini terjadi pada masa-masa tertentu dalam satu tahun. Biasanya terjadi di sektor pertanian sehingga petani akan manganggur saat

menunggu masa tanam dan saat jeda antara musim tanam dan musim panen.

2.1.4.3 Faktor Penyebab Pengangguran

Secara umum, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran, yaitu:

1. Jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang.

Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang sangat tinggi sangat memungkinkan terjadinya pengangguran. Jumlah lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan angkatan kerja menyebabkan tidak mampu menyerap tenaga kerja sehingga terjadi pengangguran.

2. Kemajuan teknologi

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan peran manusia dalam dunia kerja digantikan oleh teknologi seperti robot dalam hal produksi, hal ini dikarenakan tenaga mesin dirasa lebih cepat, dan biayanya lebih murah.

3. Keterampilan dan pengalaman tidak sesuai kriteria

Setiap perusahaan memiliki kriteria tertentu dalam menerima karyawan, namun tentu saja akan ada persaingan dalam hal ini. Semakin tinggi keterampilan seseorang maka akan semakin mudah pula untuk diterima. Begitupun sebaliknya.

4. Kurangnya pendidikan

Semakin tinggi gelar dan derajat seseorang biasanya akan semakin mudah mendapatkan pekerjaan. Sebaliknya orang yang memiliki tingkat pendidikan

rendah lebih banyak menjadi buruh kasar terlebih jika seseorang tersebut tidak memiliki jiwa usaha.

5. Adanya peralihan lahan dari pertanian menjadi kawasan industri dan *real estate*.

Peralihan ini menyebabkan peralihan mata pencaharian dimana bagi yang tidak memiliki kompetensi akan kesulitan menghadapinya dan bukan tidak mungkin akan terjadi pengangguran.

6. Kemiskinan

Orang yang tumbuh di lingkungan miskin biasanya juga akan tumbuh menjadi orang yang kekurangan. Hal ini dikarenakan mayoritas rakyat bawah di Indonesia tidak bisa mengenyam pendidikan yang baik sehingga banyak dari mereka yang menganggur.

2.1.4.4 Dampak Pengangguran

Menurut Nanga (2001), menyebutkan adanya dampak dari pengangguran, diantaranya:

- a. Bagi Perekonomian Negara

1. Penurunan penerimaan pemerintah dari sektor pajak

Penerimaan negara merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah yang bersumber dari masyarakat berupa pajak maupun non pajak. Oleh karena itu, ketika tingkat pengangguran tinggi, negara tidak bisa memperoleh pendapatan berupa pajak penghasilan (PPh) sehingga jumlah penerimaan negara akan menurun. Penerimaan pendapatan yang rendah tidak bisa melakukan pembangunan karena kurangnya biaya.

2. Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah

Penerimaan negara diperlukan untuk membiayai pengeluaran negara. Salah satu pengeluaran negara adalah untuk biaya sosial guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia berupa kesejahteraan hidup. Pengangguran akan menimbulkan masalah sosial seperti pengemis, gelandangan dan anak jalanan, semakin banyak masalah sosial tersebut dapat menyebabkan meningkatnya biaya sosial untuk penertiban, penampungan dan lain-lain.

b. Bagi Individu dan Masyarakat

1. Menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial

Tingkat pengangguran yang tinggi menggambarkan banyak masyarakat yang kehilangan pendapatan. Namun, mereka tetap dituntut memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarganya. Untuk itu, mereka akan melakukan segala cara demi terpenuhi kebutuhan. Hal inilah yang akan menyebabkan kerawanan sosial seperti pencopetan, perampokan dan tindak kriminal lainnya. Selain itu pengangguran yang tinggi akan menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah sehingga dapat menimbulkan unjuk rasa, demonstrasi dan sebagainya yang menyebabkan keadaan politik menjadi tidak stabil.

2. Menghilangkan keterampilan seseorang karena kemampuan atau keahlian yang tidak digunakan. Keterampilan dalam mengerjakan suatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek.

2.1.4.5 Cara Pengukuran Tingkat Pengangguran

Untuk mengetahui tingkat pengangguran dapat diukur melalui dua pendekatan sebagai berikut (Murni, 2006):

1. Pendekatan Angkatan Kerja (*Labor force approach*)

Besar kecilnya tingkat pengangguran dapat dihitung berdasarkan persentase dari perbandingan jumlah antara orang yang menganggur dan jumlah angkatan kerja. Berikut formulanya:

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

2. Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*Labor utilization approach*)

Untuk menentukan besar kecilnya tingkat pengangguran yang didasarkan pada pendekatan pemanfaatan tenaga kerja antara lain:

- a. Bekerja penuh (*employed*) adalah orang-orang yang bekerja secara penuh mencapai 35 jam per minggu.
- b. Setengah menganggur (*underemployed*) adalah orang-orang yang bekerja tetapi belum dimanfaatkan secara penuh yaitu jam kerjanya kurang dari 35 jam dalam seminggu.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh PDRB perkapita, Investasi, dan TPT terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi DIY periode 2000-2018. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Sulawesi Tahun 2011-2015 (Salma Audiena Al Faizah,2018)	Menggunakan variabel terikat Ketimpangan Pendapatan dan variabel bebas investasi	Menggunakan variabel bebas IPM dan Jumlah Penduduk	Variabel IPM dan investasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan.	http://eprints.uns.ac.id/58260/3/ HALA MAN% 20DEP AN.pdf
2.	Analisis Faktor Partisipasi Kasar, Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Investasi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kota Padang (Sukron,2018)	Menggunakan variabel terikat Ketimpangan Pendapatan dan variabel bebas Investasi	Menggunakan variabel bebas Partisipasi Kasar dan Jumlah Penduduk Yang Bekerja	Partisipasi Kasar berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, Jumlah penduduk Yang Bekerja berpengaruh positif dan signifikan, dan investasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan.	http://ejournal.bunghatta.ac.id/
3.	Pengaruh PDRB Perkapita, Investasi Dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi DIY Tahun	Menggunakan variabel terikat Ketimpangan Pendapatan dan variabel bebas PDRB Perkapita, Investasi	menggunakan variabel bebas IPM	Secara parsial variabel PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan,	http://journaldent.uny.ac.id/ojs/index.php/ekonomi/article/view/7227

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2011-2015 (Nita Tri Hartini, 2017)			sementara investasi dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan	
4.	Analisis Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Investasi dan IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005- 2012(Muhamm ad Haris Hidayat,2014)	Menggunakan variabel terikat ketimpangan pendapatan dan variabel bebas Investasi	Menggunakan variabel bebas IPM dan Pertumbuhan Ekonomi	Variabel Pertumbuhan Ekonomi dan IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan Pendapatan antar daerah, sedangkan investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah.	<a href="https://eprints.un
dip.ac.id
/43810/">https://e prints.un dip.ac.id /43810/
5.	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2010- 2015 (Anis Tunas Sylviarani,201 7)	Menggunakan variabel terikat ketimpangan pendapatan dan variabel bebas Tingkat Pengangguran	Menggunakan variabel bebas PDRB, Inflasi, IPM dan UMR	Variabel Inflasi dan PDRB memiliki pengaruh negatif, Sedangkan IPM, UMR dan Tingkat Pengangguran berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan.	<a href="https://eprints.u
ms.ac.id">https://e prints.u ms.ac.id

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2007-2013 (Ani Nurlaili,2016)	Menggunakan variabel terikat ketimpangan pendapatan dan variabel bebas PDRB Perkapita dan TPT	Menggunakan variabel bebas populasi penduduk dan derajat desentralisasi fiskal	Variabel PDRB Perkapita, populasi penduduk dan TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan pendapatan. Sementara derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.	https://eprints.uny.ac.id
7.	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM,TPAK dan Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014 (Masruri, 2016)	Menggunakan variabel terikat ketimpangan pendapatan dan variabel bebas TPT	Menggunakan variabel bebas Pertumbuhan ekonomi, IPM, dan TPAK	Variabel Pertumbuhan ekonomi, dan TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan IPM dan TPAK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah Tahun 2011-2014.	http://jimmfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/344 <u>2</u>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan IPM terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah (Trio Aditya Kinanda,2017)	Menggunakan variabel terikat ketimpangan dan variabel bebas pengangguran	Menggunakan variabel bebas Pertumbuhan Ekonomi dan IPM	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan. Sedangkan IPM dan pengangguran berpengaruh positif signifikan.	http://eprints.um.ac.id/35277/
9.	Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, UMP, Belanja Modal dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014 (Muara Nangarumba,2015)	Menggunakan variabel terikat ketimpangan pendapatan dan variabel bebas Investasi	Menggunakan variabel bebas Belanja Modal , UMP dan Struktur ekonomi	PDRB dari sektor pertanian dan sektor jasa, UMP dan juga kredit investasi berhubungan negatif. Sedangkan PDRB sektor industri positif terhadap ketimpangan pendapatan	http://jurnal.um.ac.id/index.php/jesp/article/view/5326
10.	Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Tahun 2010-2016 (Mochamad Faisal Rinjani,2018)	Menggunakan variabel terikat ketimpangan dan variabel bebas TPT, PDRB Perkapita, PMDN	Menggunakan variabel bebas Pertumbuhan Ekonomi, IPM dan PMA	Pertumbuhan Ekonomi dan TPT berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan PDRB Perkapita, PMDN, PMA, dan IPM berpengaruh negatif signifikan.	Repository.umy.ac.id

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran dan Panjang Jalan terhadap Ketimpangan Antar Wilayah Menurut Tipologi Klassen Pada 25 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2008 (Faiz, Asman Al dan Nugroho,2011)	Menggunakan variabel terikat ketimpangan pendapatan dan variabel bebas tingkat pengangguran	Menggunakan variabel bebas Pertumbuhan ekonomi, aglomerasi dan panjang jalan	Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi dan Tingkat Pengangguran berpengaruh positif signifikan. Sedangkan panjang jalan tidak berpengaruh signifikan.	https://eprints.unidip.ac.id/29392/
12.	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2010-2016 (Ellza Alfya Rahma,2018)	Menggunakan variabel terikat ketimpangan pendapatan dan variabel bebas TPT dan PDRB Perkapita	Menggunakan variabel bebas IPM dan TPAK	Variabel PDRB Perkapita, IPM dan TPT berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar provinsi di Pulau Jawa, sedangkan variabel TPAK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan	https://dspace.uin-suka.ac.id/

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				pendapatan.	
13.	Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2013 (Riska Dwi Astuti, 2015)	Menggunakan variabel terikat ketimpangan pendapatan dan variabel bebas PDRB Perkapita	Menggunakan variabel bebas IPM dan Populasi Penduduk	Variabel IPM memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. PDRB Perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Populasi penduduk berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.	https://dspace.uin.ac.id/handle/12345678914383
14.	Analisis Ketimpangan Pembangunan di Indonesia (Ari Muliarta Ginting, 2014)	Menggunakan variabel terikat ketimpangan dan variabel bebas investasi dan PDRB Perkapita	Menggunakan variabel bebas aglomerasi	PDRB Perkapita dan Investasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan aglomerasi memiliki pengaruh positif signifikan.	Reposito ry.ut.ac.id
15.	Analisis Pengaruh TPAK wanita, PDRB Perkapita, IPM dan TPT terhadap Ketimpangan	Menggunakan Variabel terikat ketimpangan pendapatan dan variabel bebas PDRB Perkapita dan	Menggunakan variabel bebas TPAK wanita dan IPM	Variabel TPAK wanita, IPM dan TPT memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap	https://jurnal.mfeb.uin.ac.id/index.php/jurnal_mfeb/article/view/5081/4463

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pendapatan di TPT Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009-2016 (Lyo Akhbar Pratama Putra,2018)				Ketimpangan Pendapatan dan variabel PDRB Perkapita memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, dimunculkan kerangka berpikir dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi DIY periode 2000-2018.

2.2.1 Hubungan PDRB per kapita dengan Ketimpangan Pendapatan

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi PDRB dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang tinggi di suatu daerah tidak menjadi masalah selama produktivitas penduduk daerah yang bersangkutan juga tinggi sehingga tidak menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Menurut Thamrin (2001:79), semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakatnya. Apabila pendapatan tinggi dan merata maka dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa

hubungannya adalah negatif dimana semakin tinggi pendapatan maka ketimpangan pendapatan semakin berkurang. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Riska Dwi Astuti (2015) bahwa PDRB perkapita mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

2.2.2 Hubungan Investasi dengan Ketimpangan Pendapatan

Investasi merupakan penanaman modal dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Berdasarkan teori Harrod Domar, pembentukan modal merupakan faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Investasi akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Harrod-Domar berpendapat bahwa peningkatan investasi di suatu daerah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat di daerah tersebut, sehingga kurangnya investasi di suatu daerah akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita masyarakatnya rendah karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi produktif. Seiring peningkatan dan penurunan tersebut maka akan berpengaruh pada ketimpangan pendapatan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa investasi memiliki hubungan yang negatif yaitu peningkatan investasi dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2014) bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

2.2.3 Hubungan TPT dengan Ketimpangan Pendapatan

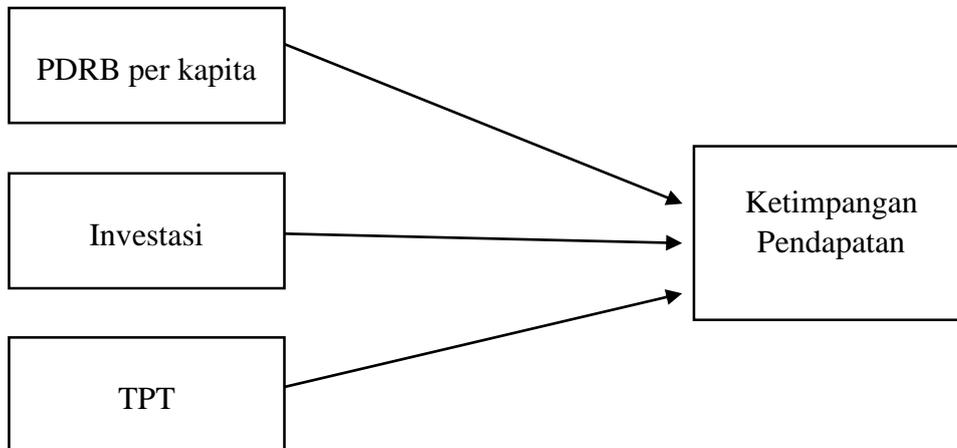
Tingkat pengangguran terbuka merupakan angka yang menandakan banyaknya pengangguran terhadap seratus penduduk yang tergolong dalam

angkatan kerja. Pengangguran dapat menyebabkan masalah sosial dan ekonomi. Menurut Sjafrizal (2012), dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah perlu memperhatikan tingkat penganggurannya karena pengangguran adalah salah satu faktor utama dalam kesejahteraan masyarakat. Tingginya angka pengangguran akan menyebabkan masyarakat tidak mampu memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan riil (nyata) yang dicapai lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya) sehingga kemakmuran yang dicapai masyarakat pun akan lebih rendah dan distribusi pendapatan semakin tidak merata.

Tingkat Pengangguran Terbuka yang tinggi akan berdampak terhadap tingkat pendapatan. Seseorang yang menjadi pengangguran tidak akan memiliki penghasilan sehingga kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi tidak dapat terpenuhi dengan baik. Akibatnya, mereka akan menjadi miskin dan mengakibatkan jumlah penduduk miskin semakin membengkak dan meningkatkan jumlah ketimpangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, pada saat tingkat pengangguran terbuka naik maka ketimpangan distribusi pendapatan juga naik.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Masruri (2016) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka tergambar kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian yang harus di uji kebenarannya. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dapat dikemukakan suatu hipotesis yang akan diuji kebenarannya, yaitu:

1. Diduga PDRB perkapita dan Investasi berpengaruh negatif, sedangkan TPT berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2000-2018 secara parsial.
2. Diduga PDRB perkapita, Investasi, dan TPT berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2000-2018 secara bersama-sama.